

2025

Laporan Keberlanjutan

Sustainability Report



PT BPR NTB PERSERODA

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
1. Pendahuluan dan Strategi Keberlanjutan	1
2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Keberlanjutan	3
2.1. Kinerja Ekonomi	3
2.2. Kinerja Lingkungan Hidup	6
2.3. Kinerja Sosial	7
2.4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	9
3. Profil Bank	11
4. Penjelasan Direksi	16
5. Tata Kelola Keberlanjutan	25
Umpan Balik	28
Penutup	29

Kata Pengantar

Sejalan dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017, PT BPR NTB PERSERODA menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2025–2029 sebagai pedoman strategis dalam menerapkan prinsip keberlanjutan secara terstruktur dan berkesinambungan.

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, PT BPR NTB PERSERODA berkomitmen menyalurkan pembiayaan secara selektif dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), serta menghindari aktivitas usaha yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Prinsip triple bottom line (People, Planet, Profit) menjadi dasar dalam setiap aktivitas bisnis bank.

Penyusunan RAKB dilakukan sebagai bentuk pemenuhan regulasi OJK dan menjadi acuan implementasi Keuangan Berkelanjutan secara bertahap. Bank juga berkomitmen memperkuat peran dalam pembangunan ekonomi daerah melalui pertumbuhan bisnis yang sehat, perluasan inklusi keuangan, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat.

Dari aspek sosial, bank berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan dari aspek lingkungan dilakukan melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan penerapan praktik operasional yang ramah lingkungan. Seluruh upaya tersebut didukung oleh penguatan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan kepatuhan terhadap regulasi.

Implementasi Keuangan Berkelanjutan juga diperkuat melalui pengembangan kapasitas SDM, sosialisasi budaya keberlanjutan secara berjenjang, serta pelibatan mitra bisnis dan pemasok dalam penerapan prinsip keberlanjutan. Dalam jangka menengah, ditargetkan seluruh pegawai dan mitra kerja memiliki pemahaman yang memadai terhadap praktik keberlanjutan.

Secara keseluruhan, PT BPR NTB PERSERODA berkomitmen menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan sekaligus meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan.

1.

Pendahuluan dan Penjelasan Strategi Keberlanjutan

Tentang Laporan Keberlanjutan

PT BPR NTB PERSERODA sebagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) berkomitmen untuk berkontribusi untuk menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat luas secara berkelanjutan. Sebagai lembaga perantara (intermediary institution) yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa Tabungan dan Deposito, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan, PT BPR NTB PERSERODA berkewajiban dalam membiayai debitur secara selektif dengan menghindari diri pada kegiatan usaha yang dapat merusak lingkungan hidup dan juga yang kontraproduktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam keterkaitan positif ini (positive linkage), BPR Go Digital menyadari pentingnya pengelolaan Keuangan Berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip triple bottom line yaitu People (Sosial), Planet (Lingkungan) dan Profit (Ekonomi) dalam seluruh aktivitas usaha Bank, melalui penyelarasan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) atau ESG (Environmental, Social and Governance).

PT BPR NTB PERSERODA berkomitmen untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan melalui penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) sebagai pedoman dalam mengimplementasikan prinsip keberlanjutan secara efektif pada periode 2025 hingga 2029. RAKB ini disusun untuk mendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan arah kebijakan regulator.

Sesuai dengan kategori BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar, PT BPR NTB PERSERODA telah pertama kali menyusun RAKB pada tahun 2024 dan mulai melaksanakan implementasinya secara bertahap pada tahun 2025. Proses ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian bertahap terhadap penerapan prinsip Sustainable Finance di lingkungan perbankan.

Penyusunan RAKB mengacu pada POJK Nomor 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, serta pedoman teknis implementasi yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Dengan demikian, RAKB menjadi dasar dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha bank berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan, tata kelola yang baik, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

PT BPR NTB PERSERODA berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan operasional bank dengan menerapkan prinsip tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan, meliputi nasabah, pegawai, pemegang saham, serta lingkungan. Selain itu, bank juga berperan aktif dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui kegiatan usaha yang sehat, inklusif, dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang.

Acuan dan Standar Penyusunan Laporan Keberlanjutan

Sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) di Indonesia yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51 / POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, PT BPR NTB PERSERODA merespons kebijakan tersebut dengan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) PT BPR NTB PERSERODA Tahun 2025 sebagai fondasi dan landasan strategik dalam menerapkan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan dalam kegiatan usaha Bank.

Strategi Keberlanjutan

Strategi PT BPR NTB PERSERODA dalam mewujudkan Keuangan Berkelanjutan mengedepankan pada 3 aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan hidup yang memberikan dampak positif dan nilai tambah bagi Bank serta seluruh pemangku kepentingan. Implementasi dilakukan melalui layanan produk dan jasa keuangan Bank yang terintegrasi dengan prinsip berkelanjutan. PT BPR NTB PERSERODA mengintegrasikan bisnis dengan tiga aspek tersebut melalui :

1. Ekonomi: Menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan, memperkuat kualitas portofolio kredit, serta berpartisipasi aktif dalam membangun inklusi keuangan bagi masyarakat dengan menerapkan etika bisnis manajemen risiko yang prudent, dan transformasi digital guna memenuhi kebutuhan nasabah secara adaptif dan bertanggung jawab;
2. Sosial: Memberi dampak positif bagi masyarakat melalui program literasi dan inklusi keuangan, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan; dan
3. Lingkungan: Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan yang dimulai dari internal perusahaan, termasuk efisiensi penggunaan sumber daya, penerapan praktik operasional yang ramah lingkungan, serta penguatan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan kepatuhan terhadap seluruh norma serta peraturan yang berlaku.

Perusahaan menciptakan dan berbagi nilai- nilai dengan pemangku kepentingan dan terus berupaya meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan operasional. Berbagai kebijakan strategis terkait keberlanjutan dirancang sesuai dengan kebutuhan dan dievaluasi efektifitasnya secara berkala untuk penyempurnaan sesuai dengan kondisi dan lingkungan bisnis.

Sosialisasi budaya keberlanjutan di kalangan karyawan dilakukan secara berjenjang dari pimpinan tertinggi seluruh pegawai melalui pelatihan internal, briefing rutin, serta penyediaan modul keberlanjutan pada portal di website perusahaan sebagai bagian dari self learning yang wajib diikuti oleh karyawan. Dalam waktu 3 (tiga) tahun, ditargetkan seluruh karyawan telah memahami dan mampu mengimplementasikan praktik keberlanjutan. Perusahaan juga melakukan pelatihan untuk mitra bisnis dan pemasok tertentu terkait prinsip keberlanjutan sebagai bagian dari strategi penguatan mitra bisnis/rantai pemasok berkelanjutan (sustainable supplier). Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, ditargetkan seluruh supplier telah mengikuti pelatihan dan memahami standar keberlanjutan yang diterapkan oleh PT BPR NTB PERSERODA.

2.

Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Keberlanjutan

1. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Ekonomi

Perbandingan Target dan Kinerja Keuangan, Portofolio, Pendapatan dan Laba Rugi

Keterangan	2025	2024	2023
Kinerja Keuangan (Dalam Satuan Rupiah Penuh)			
Total Aset	1.230.067.637.038	1.088.232.650.912	1.002.948.989.543
Aset Produktif	1.230.067.637.038	1.115.320.108.606	1.022.285.127.056
Kredit/Pembiayaan Bank	1.079.028.798.095	989.219.944.359	895.044.309.377
Dana Pihak Ketiga	817.508.084.123	752.462.642.550	680.302.973.161
Pendapatan Operasional	247.316.641.955	177.864.765.861	160.424.461.283
Beban Operasional	182.773.556.008	133.512.533.926	124.375.284.770
Laba Bersih	50.119.385.811	35.328.471.095	28.859.036.633
Rasio Kinerja (Dalam %)			
Rasio Kecukupan Modal Minimum (KPM)	47,44	47,67	52,48
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	8,93	8,89	8,04
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	8,93	8,89	8,04
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap aset produktif	6,58	5,27	4,65
NPL/NPF Gross	7,49	7,20	7,03
NPL/NPF Nett	14,35	12,70	11,89
Return on Asset (ROA)	5,74	4,48	3,73
Net Interest Margin (NIM)	17,41	13,55	13,06
Rasio Efisiensi (BOPO)	73,90	74,75	77,53
Loan to Deposit Ratio (LDR)	130,22	129,39	94,93

Kinerja usaha PT BPR NTB PERSERODA menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Total aset mengalami peningkatan menjadi Rp1,23 triliun, didorong oleh pertumbuhan aset produktif yang sejalan dengan ekspansi penyaluran kredit/ pembiayaan yang mencapai Rp1,08 triliun. Hal ini mencerminkan optimalisasi fungsi intermediasi Perseroan dalam mendukung pembiayaan sektor riil, khususnya UMKM. Dari sisi portofolio, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat menjadi Rp817,5 miliar, yang menunjukkan kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan menjadi sumber pendanaan utama dalam mendukung ekspansi kredit. Pendapatan operasional tercatat sebesar Rp247,3 miliar, meningkat signifikan dibanding periode sebelumnya. Peningkatan ini antara lain dipengaruhi oleh penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP) pada tahun 2025, khususnya melalui konversi metode suku bunga dari flat rate menjadi Effective Interest Rate (EIR), yang berdampak pada peningkatan pengakuan pendapatan bunga secara lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Di sisi lain, penerapan SAK-EP juga membawa perubahan pada metode pembentukan cadangan, dari sebelumnya menggunakan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPKA) menjadi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Perubahan ini berdampak signifikan terhadap peningkatan biaya pencadangan. Meskipun terjadi peningkatan beban akibat penyesuaian CKPN, Perseroan tetap mampu mencatatkan laba bersih sebesar Rp50,1 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, penerapan SAK-EP memberikan dampak positif terhadap kualitas pelaporan keuangan serta tetap mendukung kinerja profitabilitas Perseroan.

Kinerja Aspek Ekonomi terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Jumlah Jenis produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan				
a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan	-	-	-	-
a.1. DPK	-	-	-	-
a.2. Surat Berharga	-	-	-	-
a.3. Lainnya	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan	1	1	1	1
b.1. Kredit / Pembiayaan	1	1	1	1
b.2. Surat Berharga	-	-	-	-
b.3. Lainnya	-	-	-	-
Outstanding produk dan/atau jasa yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan (Dalam Satuan Rupiah Penuh)				
a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan	-	-	-	-
a.1. DPK	-	-	-	-
a.2. Surat Berharga yang diterbitkan	-	-	-	-
a.3. Lainnya	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan	641.231.334.964	655.624.033.371	576.331.185.457	491.126.045.210
b.1. Kredit / Pembiayaan	641.231.334.964	655.624.033.371	576.331.185.457	491.126.045.210
b.2. Surat Berharga yang dimiliki	-	-	-	-
b.3. Lainnya	-	-	-	-
Total Outstanding DPK (Rp)	-	-	-	-
Total Nominal Surat Berharga yang diterbitkan (Rp)	-	-	-	-
Total Outstanding Kredit Kepada Pihak Ketiga (Rp)	1.097.622.962.964	1.079.028.798.064	989.219.944.358	895.044.309.346
Total Nominal Surat Berharga yang dimiliki (Rp)	-	-	-	-

Persentase Total Portofolio Kegiatan Usaha Berkelanjutan terhadap Total Portofolio (%)

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan				
a.1. DPK	-	-	-	-
a.2. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan (Kredit)				
b.1. Kredit / Pembiayaan	58,42%	60,76%	58,26%	54,87%
b.2. Surat Berharga yang dimiliki	-	-	-	-

Total outstanding kredit/pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan (Rp)

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Energi Terbarukan	-	-	-	-
b. Efisiensi Energi	-	-	-	-
c. Pencegahan dan Pengendalian Polusi	-	-	-	-
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	-	-	-	-
e. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	-	-	-	-
f. Transportasi Ramah Lingkungan	-	-	-	-
g. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	-	-	-	-
h. Adaptasi Perubahan Iklim	-	-	-	-
i. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (Ecoefficient)	-	-	-	-
j. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional	-	-	-	-
k. Kegiatan Usaha dan/ atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan Lainnya	-	-	-	-
l. Kegiatan UMKM	641.231.334.964	655.624.033.371	576.331.185.457	491.126.045.210
Total outstanding kredit/ pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan (total a - l)	641.231.334.964	655.624.033.371	576.331.185.457	491.126.045.210

2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Lingkungan Hidup

Kegiatan Internal dan Kegiatan TJSL

Dalam mendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan, PT BPR NTB PERSERODA melaksanakan inisiatif efisiensi operasional serta program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berorientasi pada keberlanjutan. Pada kegiatan internal, Perseroan mendorong efisiensi penggunaan energi dan sumber daya melalui pengendalian konsumsi listrik dan air, pemanfaatan pencahayaan alami, serta penggunaan perangkat hemat energi. Selain itu, Perseroan mulai mengadopsi konsep bangunan ramah lingkungan secara bertahap, serta mengurangi penggunaan kertas dan plastik melalui digitalisasi dokumen dan penerapan prinsip paperless. Dalam aspek TJSL, Perseroan mengalokasikan pendanaan pada program yang berdampak signifikan terhadap lingkungan, seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan upaya pelestarian sumber daya alam dengan pendekatan yang berkelanjutan. Sejalan dengan bisnis inti, kegiatan TJSL juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas pelaku UMKM dalam menerapkan praktik usaha ramah lingkungan, serta mendorong pembiayaan pada sektor-sektor yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Dukungan Pada Kelestarian Lingkungan Hidup Bagi Bank

PT BPR NTB PERSERODA berkomitmen untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup melalui penerapan praktik operasional yang lebih ramah lingkungan. Dalam penggunaan material, Perseroan mendorong pemanfaatan bahan yang lebih berkelanjutan, antara lain melalui pengurangan penggunaan kertas dengan digitalisasi dokumen (paperless) serta pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kerja. Dalam aspek penggunaan energi, Perseroan secara berkala melakukan pemantauan jumlah dan intensitas konsumsi energi, khususnya listrik dan air, sebagai dasar pengendalian yang lebih efektif. Upaya efisiensi energi dilakukan melalui penggunaan peralatan hemat energi, pengaturan waktu operasional perangkat elektronik, serta optimalisasi pencahayaan dan sirkulasi udara alami. Dari sisi pencapaian, langkah-langkah efisiensi tersebut berkontribusi terhadap pengendalian konsumsi energi secara lebih optimal dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesadaran internal dalam penerapan budaya kerja yang peduli terhadap lingkungan.

Penggunaan Energi (antara lain Air dan Listrik)

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Penggunaan Bahan Bakar (Liter)	216.500	166.790	171.658	155.880
b. Penggunaan Listrik (kWh)	597.299	550.436	540.436	479.705
c. Penggunaan Air (m3)	13.651	11.457	13.655	9.987
d. Penggunaan Kertas (kg)	10.173	9.970	9.906	8.985

Total Emisi

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Scope 1 (Ton CO2)	-	-	-	-
b. Scope 2 (Ton CO2)	-	-	-	-
c. Scope 3 (Ton CO2)	-	-	-	-
c.1. Financed Emission (Ton CO2)	-	-	-	-
c.2. Non-Financed Emission (Ton CO2)	-	-	-	-
d. Pengurangan Emisi (Ton CO2)	-	-	-	-
Total Emisi Scope 1,2,3 (a + b + c - d)	-	-	-	-
Total Limbah Dibuang (Ton CO2)	-	-	-	-
Kegiatan Pelestarian Keanekaragaman Hayati (Satuan Rupiah)	-	-	-	-

3. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan, Kinerja Sosial dan Keuangan Inklusi

Komitmen Perusahaan dan Kinerja Keuangan Inklusi

PT BPR NTB PERSERODA berkomitmen untuk mendukung inklusi keuangan melalui penyediaan layanan yang setara, adil, dan mudah diakses bagi seluruh lapisan masyarakat. Perseroan memastikan bahwa setiap konsumen memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses produk dan/ atau jasa perbankan tanpa diskriminasi, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Dalam implementasinya, Perseroan secara aktif menyediakan informasi produk dan/atau jasa yang akurat, transparan, dan mudah dipahami, sehingga konsumen dapat mengambil keputusan keuangan secara tepat. Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai media, baik secara langsung di kantor layanan maupun melalui sarana komunikasi lainnya. Sejalan dengan komitmen tersebut, Perseroan terus mendorong peningkatan kinerja keuangan inklusif melalui pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya segmen UMKM, serta perluasan akses layanan keuangan yang berkelanjutan. Dengan demikian, Perseroan tidak hanya meningkatkan kinerja bisnis, tetapi juga berkontribusi terhadap pemerataan akses keuangan di masyarakat.

Perkembangan Laku Pandai

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Jumlah Agen Laku Pandai	-	-	-	-
b. Jumlah Kepemilikan Rekening Tabungan (Basic Saving Account)	-	145.847	111.395	108.181
c. Jumlah Kepemilikan Rekening Kredit yang melalui referral Agen Laku Pandai	-	-	-	-

Kinerja Sosial Terhadap Ketenagakerjaan

PT BPR NTB PERSERODA berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Perseroan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan kesempatan kerja tanpa diskriminasi serta memastikan tidak terdapat praktik tenaga kerja paksa maupun tenaga kerja anak dalam seluruh kegiatan operasional. Pada tahun 2025, Perseroan juga memberikan kesempatan kerja bagi pegawai penyandang disabilitas, dengan tercatat sebanyak 2 (dua) orang pegawai dalam kategori tersebut. Dalam aspek kesejahteraan, Perseroan memastikan bahwa remunerasi pegawai tetap, khususnya pada tingkat terendah, telah memenuhi dan berada di atas Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku, sebagai bentuk komitmen terhadap pemenuhan hak-hak dasar pekerja. Perseroan juga menjamin lingkungan kerja yang aman dan layak bagi seluruh pegawai melalui penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta pengawasan terhadap kondisi kerja yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan. Selain itu, Perseroan secara berkelanjutan melaksanakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai, termasuk peningkatan pemahaman terkait Keuangan Berkelanjutan, guna mendukung peningkatan kapasitas SDM dan keselarasan dengan strategi bisnis Perseroan.

Kinerja Aspek Sosial Terkait Inklusivitas Ketenagakerjaan Internal Bank

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Jumlah Pegawai Bank	-	503	563	553
Jumlah Direksi dan Komisaris (Total Jumlah Pria dan Wanita)	8	5	8	7
Jumlah Direksi dan Komisaris Pria	6	3	6	5
Jumlah Direksi dan Komisaris Wanita	2	2	2	2
Jumlah Pegawai Difable	-	2	-	-

Kinerja Sosial Terhadap Masyarakat

PT BPR NTB PERSERODA berkomitmen untuk memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat melalui kegiatan usaha dan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Aktivitas operasional Perseroan secara umum memberikan kontribusi dalam peningkatan akses pembiayaan, khususnya bagi UMKM, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun potensi dampak negatif yang dapat timbul, seperti risiko kredit bermasalah, dikelola secara prudent melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai. Perseroan juga menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat sebagai bentuk perlindungan konsumen, yang dapat diakses melalui kantor layanan maupun media komunikasi resmi. Setiap pengaduan yang diterima dicatat, ditindaklanjuti, dan diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai wujud komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan. Dalam pelaksanaan TJSL, Perseroan secara aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan, dengan pendekatan yang berkelanjutan dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta strategi bisnis Perseroan.

Kinerja Aspek Sosial Terkait Dana Kegiatan Sosial Serta Keanggotaan Pada Asosiasi

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Realisasi Dana Untuk Kegiatan Sosial (Satuan Rupiah)	-	944.413.716	812.855.000	842.472.734
Jumlah Keanggotaan pada Asosiasi	2	2	2	2

4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Inovasi dan Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

PT BPR NTB PERSERODA terus mendorong inovasi dan pengembangan layanan keuangan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi digital yang mendukung efisiensi operasional dan pengurangan dampak lingkungan. Pada tahun 2025, Perseroan telah mengembangkan berbagai aplikasi pendukung operasional harian yang berorientasi pada pengurangan penggunaan kertas (paperless), sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip keberlanjutan. Beberapa aplikasi yang telah diimplementasikan antara lain Aplikasi Analisa Kredit, Aplikasi Sistem Monitoring Kinerja, Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit, Aplikasi Help Desk BPR, serta aplikasi pendukung lainnya. Pengembangan aplikasi tersebut bertujuan untuk memangkas proses birokrasi, meningkatkan kecepatan dan akurasi layanan, serta memperkuat pengendalian internal dalam kegiatan operasional. Melalui digitalisasi proses bisnis ini, Perseroan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kepada nasabah, tetapi juga berkontribusi dalam pengurangan penggunaan kertas secara signifikan. Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi pengembangan jasa keuangan berkelanjutan yang sejalan dengan upaya transformasi digital dan penerapan prinsip ramah lingkungan dalam operasional Perseroan.

Jumlah dan Persentase Produk dan Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan

PT BPR NTB PERSERODA memastikan bahwa seluruh produk dan jasa yang ditawarkan kepada nasabah telah melalui proses evaluasi keamanan yang memadai. Evaluasi ini mencakup aspek perlindungan konsumen, transparansi penyampaian risiko, serta seleksi mitra kerja yang memiliki standar keamanan dan kepatuhan yang baik. Perseroan juga berkomitmen menjaga keamanan data pribadi nasabah melalui penerapan sistem pengamanan informasi yang andal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka memastikan efektivitas pengendalian tersebut, Perseroan secara rutin melaksanakan Audit Teknologi Informasi (IT) setiap tahun guna mengidentifikasi potensi risiko serta memastikan bahwa seluruh produk dan layanan tetap aman dan terlindungi. Dengan pendekatan tersebut, seluruh produk dan jasa Perseroan dapat dikategorikan telah dievaluasi dari aspek keamanan, sehingga memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi nasabah dalam menggunakan layanan perbankan.

Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan

PT BPR NTB PERSERODA hingga tahun 2025 belum secara spesifik menetapkan produk keuangan berkelanjutan tersendiri. Namun demikian, Perseroan secara prinsip telah mendukung implementasi keuangan berkelanjutan melalui penyaluran pembiayaan kepada sektor UMKM yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dari sisi dampak positif, penyaluran pembiayaan kepada UMKM memberikan manfaat dalam meningkatkan akses permodalan, mendorong pertumbuhan usaha produktif, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, distribusi produk dan jasa keuangan dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi informasi, serta perlindungan konsumen. Adapun potensi dampak negatif yang dapat timbul antara lain risiko kredit bermasalah, penggunaan dana oleh debitur yang tidak sesuai peruntukan, serta potensi dampak lingkungan dari kegiatan usaha yang dibiayai. Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan menerapkan proses analisis kredit yang komprehensif, pemantauan kualitas kredit secara berkala, serta penguatan manajemen risiko dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan pendekatan tersebut, Perseroan berupaya memastikan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan tetap memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, sekaligus meminimalkan potensi dampak negatif yang dapat timbul.

Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Sebagai salah satu pemangku kepentingan utama, nasabah memiliki peran penting dalam memberikan masukan bagi peningkatan kualitas layanan Perseroan. PT BPR NTB PERSERODA secara berkala melaksanakan survei kepuasan pelanggan sebagai bagian dari evaluasi kinerja serta upaya menjaga hubungan yang berkelanjutan dengan nasabah. Pada tahun 2025, hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan yang baik terhadap produk dan layanan Perseroan. Untuk produk simpanan, sebanyak 50,69% responden menyatakan sangat puas, 44,49% puas, dan 4,69% cukup puas. Sementara itu, untuk produk kredit, sebesar 46,84% responden menyatakan sangat puas, 45,20% puas, dan 7,83% cukup puas. Dari aspek persepsi keamanan dalam menggunakan layanan perbankan, hasil survei menunjukkan bahwa 48,68% responden merasa sangat aman, 46,17% merasa aman, dan 5,10% merasa cukup aman. Hasil ini mencerminkan tingkat kepercayaan nasabah yang tinggi terhadap keamanan dan kualitas layanan yang diberikan oleh Perseroan. Secara keseluruhan, hasil survei ini menjadi dasar bagi Perseroan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan, termasuk dalam mendukung pengembangan keuangan berkelanjutan yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan nasabah.

3. Profil Bank

Informasi Umum Perusahaan	
Nama Perusahaan	PT BPR NTB PERSERODA
Alamat	Jl. Adisucipto Kebon Roek Ampenan
Nomor Telepon	(0370) 641875
Email	office@bprntb.co.id
Website	http://www.bprntb.co.id

Skala Usaha Bank

Total Aset dan Liabilitas

Selama periode 2023–2025, PT BPR NTB PERSERODA menunjukkan tren pertumbuhan aset dan liabilitas yang konsisten. Total aset meningkat dari Rp1.002,95 miliar (2023) menjadi Rp1.088,23 miliar (2024) dan kembali tumbuh menjadi Rp1.235,55 miliar (2025). Sejalan dengan itu, liabilitas juga mengalami peningkatan dari Rp741,49 miliar (2023) menjadi Rp807,97 miliar (2024) dan Rp941,66 miliar (2025). Secara umum, pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya aktivitas intermediasi bank dan penghimpunan dana pihak ketiga. Namun, pada tahun 2025, laju pertumbuhan liabilitas lebih tinggi dibandingkan aset, sehingga perlu diimbangi dengan penguatan penyaluran kredit produktif dan pengelolaan likuiditas yang lebih optimal untuk menjaga keseimbangan neraca bank.

Pos	2025	2024	2023
TOTAL ASET	1.235.546.162.765	1.088.232.650.912	1.002.948.989.549
TOTAL LIABILITAS	941.660.553.875	807.965.136.059	741.492.408.484

Persentase Kepemilikan Saham

Uraian		Modal Dasar		Modal Setor	
		%	Nominal	Nominal	%
Pemda Provinsi NTB (PSP)		51,00%	255.000.000.000	78.491.161.914	50,89%
Pemda Kabupaten/Kota		49,00%	245.000.000.000	75.737.023.488	49,11%
1	Pemkab. Sumbawa			16.943.050.255	10,99%
2	Pemkab. Dompu			12.239.305.639	7,93%
3	Pemkab. Lombok Tengah			12.250.000.000	7,94%
4	Pemkab. Lombok Timur			10.305.959.404	6,68%
5	Pemkab. Lombok Barat			7.679.466.874	4,98%
6	Pemkab. Bima			6.191.055.222	4,01%
7	Pemkot Mataram			4.573.952.050	2,97%
8	Pemkab. Lombok Utara			2.509.485.000	1,63%
9	Pemkab. Sumbawa Barat			2.000.000.000	1,30%
10	Pemkot Bima			1.044.749.044	0,68%
Total		100,00%	500.000.000.000	154.228.185.402	100,00%

Jumlah Karyawan

- Pegawai berdasarkan jenis kelamin :
 - Laki - Laki sebanyak 299 orang; dan
 - Perempuan sebanyak 213 orang.
- Pegawai berdasarkan usia :
 - usia ≤ 25 tahun sebanyak 45 orang;
 - usia $> 25 - 35$ tahun sebanyak 188 orang;
 - usia $> 35 - 45$ tahun sebanyak 90 orang;
 - usia $> 45 - 55$ tahun sebanyak 182 orang; dan
 - usia > 55 tahun sebanyak 7 orang.
- Pegawai berdasarkan jabatan :
 - Pemasaran sebanyak 220 orang;
 - Pelayanan sebanyak 92 orang; dan
 - Lainnya sebanyak 200 orang.
- Pegawai berdasarkan status ketenagakerjaan
 - Pegawai Tetap sebanyak 454 orang; dan
 - Pegawai Tidak Tetap sebanyak 58 orang.
- Pegawai berdasarkan pendidikan
 - S1 sebanyak 4 orang;
 - S1 sebanyak 283 orang;
 - D3 sebanyak 36 orang;
 - SLTA sebanyak 178 orang; dan
 - Lainnya sebanyak 11 orang.

Wilayah Operasional

Wilayah operasional PT BPR NTB PERSERODA mencakup seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang meliputi Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Cakupan wilayah ini memungkinkan bank untuk berperan secara luas dalam mendukung pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat, khususnya dalam sektor UMKM, pertanian, perdagangan, dan ekonomi kerakyatan.

Dengan jangkauan operasional di dua pulau utama tersebut, PT BPR NTB PERSERODA memiliki peran strategis dalam memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan inklusi keuangan, serta mendukung pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB.

No.	Nama Kantor	No.	Nama Kantor
Kantor Pusat Mataram		25	KC Taliwang
Kantor Cabang (KC)		26	KC Seteluk
1	KC Gerung	27	KC Sumbawa
2	KC Narmada	28	KC Empang
3	KC Labuapi	29	KC Plampang
4	KC Kuripan	30	KC Lopok
5	KC Gunung Sari	31	KC Moyo
6	KC Kayangan	32	KC Lenangguar
7	KC Bayan	33	KC Labuhan Sumbawa
8	KC Praya	34	KC Utan
9	KC Praya Timur	35	KC Alas
10	KC Janapria	36	KC Dompur
11	KC Batukliang	37	KC Montabaru
12	KC Pujut	38	KC Soriutu
13	KC Jonggat	39	KC Rasabou
14	KC Kopang	40	KC Bima
15	KC Praya Barat	41	KC Woha
16	KC Pringgarata	42	KC Bolo
17	KC Selong	43	KC Sape
18	KC Montong Betok	Kantor Kas (KK)	
19	KC Kotaraja	1	KK. Bertais
20	KC Paokmotong	2	KK. Seketeng
21	KC Dasan Lekong	3	KK. Buer
22	KC Aikmel	4	KK. Labuhan Jambu
23	KC Labuhan Lombok	5	KK. Belo
24	KC Sambelia	6	KK. Bajo

Produk dan Layanan

Produk Penyaluran Kredit	Produk Simpanan
1. Kredit Modal Kerja 2. Kredit Investasi 3. Kredit Konsumtif	1. Tabungan Sukses 2. TabunganKu 3. Tabungan Simbada 4. Simpanan Pelajar 5. Deposito

Profil Singkat dan Nilai Keberlanjutan Bank

a. Visi Keberlanjutan

Menjadi bank perekonomian rakyat yang sehat, kontributif, tangguh dan terpercaya sebagai mitra usaha rakyat.

b. Misi Keberlanjutan

1. Memberikan pelayanan prima kepada semua stakeholder yang didukung oleh teknologi yang handal;
2. Mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
3. Meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

c. Nilai Keberlanjutan dan Budaya Bank

Perubahan model bisnis dan adaptasi pada cara kerja yang baru merupakan sesuatu yang bernilai untuk dapat bertahan dan tumbuh secara berkelanjutan. Dalam hal ini disadari pentingnya peran sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian. Oleh karena itu, prinsip-prinsip berkelanjutan harus ditanamkan dalam aktivitas guna untuk membangun Sektor Jasa Keuangan yang bertanggungjawab. PT BPR NTB PERSERODA sebagai bagian dari Sektor Jasa Keuangan berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan dengan menyelaraskan pada kepentingan sosial, lingkungan hidup, dan serta tata kelola perusahaan yang baik guna mencapai tujuan usaha yang sehat.

d. Keanggotaan Pada Asosiasi Regional hingga Nasional

PT BPR NTB PERSERODA aktif berpartisipasi dalam keanggotaan asosiasi perbankan sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas industri. Perseroan tercatat sebagai anggota PERBARINDO dan PERBAMIDA. Melalui keanggotaan tersebut, Perseroan memperoleh akses terhadap informasi terkini, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta forum koordinasi dan advokasi kebijakan yang mendukung pengembangan industri BPR dan perbankan daerah secara berkelanjutan.

Nama Organisasi	Lingkup	Peran dan Kontribusi Perusahaan	Periode
Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (PERBARINDO)	Organisasi bagi industri perbankan nasional	Sebagai Anggota	Sampai Sekarang
Perhimpunan BPR Milik Pemerintah Daerah se-Indonesia (PERBAMIDA)	Organisasi bagi industri BPR Milik Pemerintah Daerah se-Indonesia	Sebagai Anggota	Sampai Sekarang

e. Perubahan yang Bersifat Signifikan

Tahun 2025 merupakan periode penting dalam perjalanan transformasi pelaporan keuangan perusahaan seiring dengan mulai diimplementasikannya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP). Penerapan standar ini membawa perubahan yang signifikan, tidak hanya pada aspek teknis pencatatan akuntansi, tetapi juga pada cara pandang entitas dalam mengelola, mengukur, dan menyajikan informasi keuangan secara lebih relevan dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Salah satu perubahan mendasar yang paling berpengaruh adalah pergeseran metode pengukuran penurunan nilai aset keuangan, khususnya kredit, dari pendekatan konvensional menjadi pendekatan Expected Credit Loss (ECL). Perubahan ini berdampak langsung pada pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang kini tidak lagi semata-mata berbasis status kolektibilitas kredit, melainkan mempertimbangkan data historis, kondisi saat ini, serta proyeksi ekonomi di masa depan. Hal ini menjadikan pencadangan lebih dinamis dan lebih sensitif terhadap risiko. Selain itu, penerapan SAK-EP juga memperkenalkan penggunaan Effective Interest Rate (EIR) dalam pengukuran pendapatan bunga. Metode ini mengubah cara pengakuan pendapatan dari yang sebelumnya cenderung linear menjadi lebih mencerminkan nilai waktu uang secara ekonomis. Dampaknya, pola pengakuan pendapatan menjadi lebih terukur dan konsisten dengan profil risiko dan arus kas kontraktual. Perubahan lainnya juga terlihat pada peningkatan kebutuhan sistem informasi akuntansi yang lebih andal dan terintegrasi, mengingat kompleksitas perhitungan berbasis estimasi dan data historis yang semakin tinggi. Hal ini menuntut penguatan kualitas data, validitas model perhitungan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi dan manajemen risiko. Secara keseluruhan, implementasi SAK-EP di tahun 2025 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap laporan keuangan, baik dari sisi struktur beban pencadangan, pengakuan pendapatan, maupun penyajian informasi keuangan secara lebih transparan dan akuntabel. Meskipun pada tahap awal penerapan menimbulkan penyesuaian yang cukup besar, namun dalam jangka panjang standar ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan serta memperkuat daya banding dan kredibilitas entitas di mata pemangku kepentingan.

4. Penjelasan Direksi

Penjelasan Direksi

Kebijakan Untuk Merespon Tantangan Dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

1. Nilai keberlanjutan : Perubahan model bisnis dan adaptasi pada cara kerja yang baru merupakan sesuatu yang bernilai untuk dapat bertahan dan tumbuh secara berkelanjutan. Dalam hal ini disadari pentingnya peran sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian. Oleh karena itu, prinsip-prinsip berkelanjutan harus ditanamkan dalam aktivitas guna untuk membangun Sektor Jasa Keuangan yang bertanggungjawab. PT BPR NTB PERSERODA sebagai bagian dari Sektor Jasa Keuangan berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan dengan menyelaraskan pada kepentingan sosial, lingkungan hidup, dan serta tata kelola perusahaan yang baik guna mencapai tujuan usaha yang sehat.
2. Respon terhadap isu terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan turut berperan aktif dalam mendukung implementasi SDG (Sustainable Development Goals) melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. PT BPR NTB PERSERODA sebagai perusahaan yang menjalankan usahanya di Indonesia memiliki kesadaran penuh akan pentingnya memberikan dukungan terhadap program pemerintah terkait pembangunan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan peran PT BPR NTB PERSERODA sebagai lembaga jasa keuangan yang berfungsi sebagai intermediary dalam mendukung penerapan keuangan berkelanjutan melalui kebijakan pembiayaan yang bertanggung jawab. UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia serta merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2023 PT BPR NTB PERSERODA mulai mengembangkan berbagai aplikasi pendukung manajemen yang mendorong efisiensi operasional dan mengurangi penggunaan kertas (paperless) sebagai bagian dari upaya mendukung aspek lingkungan.
3. Komitmen dalam pencapaian penerapan keuangan Berkelanjutan : Selain itu, PT BPR NTB PERSERODA terus berupaya berkembang dalam memenuhi kebutuhan karyawan dan menyelaraskan kesadaran terhadap dampak lingkungan. PT BPR NTB PERSERODA telah mengembangkan berbagai aplikasi pendukung manajemen yang dapat mengurangi dampak penggunaan kertas (paperless) serta meningkatkan efisiensi dalam beraktivitas. Komitmen untuk menerapkan prinsip keberlanjutan secara konsisten dan terintegrasi, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan pada akhirnya diharapkan mampu memberikan nilai tambah jangka panjang dan memperkuat daya saing PT BPR NTB PERSERODA.
4. Pencapaian Kinerja Penerapan Keuangan Berkelanjutan : Pada tahun 2025, PT BPR NTB PERSERODA memasuki tahun kedua dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Sebagaimana diketahui, tahun 2024 merupakan tahun pertama penyusunan dan implementasi awal RAKB sebagai tahap fondasi. Sehubungan dengan hal tersebut, penerapan Keuangan Berkelanjutan di PT BPR NTB PERSERODA masih berada pada tahap penguatan fondasi dan penyesuaian kebijakan internal serta integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam proses bisnis. Fokus utama pada tahun kedua ini adalah penyempurnaan perencanaan, peningkatan pemahaman internal, serta persiapan implementasi program-program yang mendukung prinsip Keuangan Berkelanjutan secara bertahap, terukur, dan terdokumentasi dengan baik.
5. Tantangan pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan : Tantangan dalam penerapan keuangan berkelanjutan adalah peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap pemenuhan aspek LST (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) baik dari sisi internal Bank maupun dari sisi nasabah. Diperlukan proses edukasi, penyesuaian kebijakan, serta penguatan sistem dan prosedur agar prinsip keberlanjutan dapat diimplementasikan secara konsisten dalam setiap aktivitas usaha.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Dalam mengimplementasikan program Keuangan Berkelanjutan, PT BPR NTB PERSERODA membangun pola pikir keberlanjutan di seluruh pegawai sebagai bagian dari budaya perusahaan. Upaya tersebut diwujudkan melalui kepedulian terhadap lingkungan hidup di area internal PT BPR NTB PERSERODA, antara lain melalui pengembangan aplikasi pendukung manajemen yang mendorong pengurangan penggunaan kertas (paperless) serta peningkatan efisiensi operasional. Tahun 2024 merupakan tahun pertama PT BPR NTB PERSERODA dalam menyusun dan menerapkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Pada tahap awal tersebut, fokus utama diarahkan pada pembangunan fondasi kebijakan, peningkatan pemahaman internal, serta penyesuaian proses bisnis yang mendukung implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan secara bertahap dan terukur. Memasuki tahun 2025 sebagai tahun kedua pelaksanaan RAKB, PT BPR NTB PERSERODA melanjutkan komitmen tersebut melalui penguatan implementasi program, penyempurnaan rencana aksi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan, antara lain belum meratanya pemahaman di sebagian jajaran internal maupun pemangku kepentingan terhadap konsep Keuangan Berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan proses adaptasi dan internalisasi yang dilakukan secara bertahap, terstruktur, dan berkesinambungan agar prinsip keberlanjutan dapat terintegrasi secara menyeluruh dalam aktivitas usaha. Dengan pendekatan tersebut, Perseroan berupaya memastikan bahwa penerapan Keuangan Berkelanjutan tidak hanya bersifat administratif dan pemenuhan regulasi, tetapi menjadi bagian integral dari strategi bisnis, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan dalam jangka panjang.

Strategi Pencapaian Target

1. Pengelolaan Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan : Untuk mencapai target kinerja keuangan berkelanjutan di tahun 2025 ini, PT BPR NTB PERSERODA menerapkan strategi, antara lain dengan menanamkan pemahaman keuangan berkelanjutan pada seluruh pegawai melalui pelatihan dan sosialisasi serta pemantauan.
2. Pemanfaatan Peluang : Setiap tantangan tentunya membuka peluang yang dapat dimanfaatkan. PT BPR NTB PERSERODA memahami bahwa aspek Lingkungan, Sosial dan Tata kelola (LST) di dunia industri tidak seragam karena setiap industri memiliki ciri khas masing-masing. Oleh sebab itu, PT BPR NTB PERSERODA terus meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada pegawai perihal LST guna mengurangi kesenjangan pemahaman, dan akan senantiasa berproses bersama dengan debitur untuk menuju penerapan aspek LST lebih baik.
3. Penjelasan situasi eksternal ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial : Dengan mempertimbangkan faktor eksternal yang terjadi, seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan nilai tukar, penurunan daya beli masyarakat, peningkatan biaya energi, dan lain-lain, perusahaan telah melakukan berbagai strategi untuk mengatasi dampak negatif atas faktor eksternal tersebut.

Tantangan dan Permasalahan yang dihadapi dari Sisi Internal

1. Fokus Bisnis Bank

Pada tahun 2025, PT BPR NTB PERSERODA mengalami dinamika signifikan dalam tata kelola perusahaan dengan terjadinya pemberhentian 2 (dua) orang Direksi dan 2 (dua) orang Komisaris. Kondisi ini memberikan dampak terhadap stabilitas pengelolaan usaha, terutama dalam aspek pengambilan keputusan strategis dan arah kebijakan bisnis bank. Dampak langsung dari situasi tersebut terlihat pada pergeseran fokus bisnis bank yang cenderung lebih bersifat adaptif terhadap kondisi operasional. Hal ini turut tercermin pada peningkatan nominal serta rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) selama tahun berjalan. Meskipun secara umum kinerja tahun 2025 masih menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, namun capaian tersebut belum sepenuhnya optimal dan belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Di sisi lain, keterbatasan pada struktur tata kelola perusahaan juga menyebabkan sejumlah strategi bisnis yang telah direncanakan tidak dapat diimplementasikan secara maksimal. Kondisi ini berdampak pada perlambatan beberapa inisiatif pengembangan usaha, baik dari sisi ekspansi maupun penguatan kualitas portofolio kredit. Namun demikian, manajemen tetap berupaya menjaga keberlangsungan operasional bank dengan melakukan berbagai langkah penyesuaian dan perbaikan secara bertahap. Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas kinerja, memperkuat pengendalian risiko, serta mempersiapkan fondasi perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Dengan demikian, tahun 2025 dapat dipandang sebagai periode konsolidasi yang penting dalam rangka pemulihan dan penguatan kembali kinerja perusahaan di masa mendatang.

2. Operasional Bank

Pada tahun 2025, operasional bank mengalami tekanan yang cukup signifikan sebagai dampak dari penerapan tata kelola pasca pemberhentian Direksi dan Komisaris. Kondisi ini berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian operasional serta kualitas pelaksanaan layanan kepada nasabah, sehingga memerlukan berbagai instrumen penyesuaian agar stabilitas kegiatan usaha tetap terjaga. Selain itu, tahun 2025 juga menjadi periode penting dalam transisi implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP), yang menuntut perubahan signifikan dalam proses pencatatan dan pengakuan keuangan bank. Penerapan SAK-EP, khususnya pada aspek perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berbasis Expected Credit Loss (ECL) serta penerapan Effective Interest Rate (EIR), memberikan tantangan tambahan terhadap operasional bank. Hal ini memerlukan penyesuaian sistem, peningkatan kualitas data, serta penguatan pemahaman teknis SDM agar proses pelaporan keuangan tetap akurat, andal, dan sesuai ketentuan. Dalam situasi tersebut, penguatan kendali operasional menjadi fokus utama melalui penyesuaian mekanisme kerja, penguatan pengawasan internal, serta optimalisasi fungsi unit kerja yang ada. Langkah-langkah ini dilakukan tidak hanya untuk meminimalkan dampak terhadap kualitas layanan, tetapi juga untuk memastikan bahwa implementasi SAK-EP dapat berjalan secara bertahap tanpa mengganggu keberlangsungan operasional bank. Di sisi lain, kebutuhan akan pengambilan keputusan strategis menjadi semakin krusial dalam rangka menjaga kinerja perusahaan di tengah dinamika tata kelola dan kompleksitas penyesuaian standar akuntansi yang terjadi sepanjang tahun 2025. Kondisi ini menuntut adanya keseimbangan antara stabilitas operasional jangka pendek dan kesiapan implementasi standar akuntansi baru dalam pelaporan keuangan bank. Sejalan dengan upaya perbaikan tersebut, kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris telah diisi melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia yang ditunjuk oleh Pemegang Saham. Hasil dari proses tersebut, seorang Direktur Operasional resmi mulai menjabat pada Triwulan IV tahun 2025, yang kemudian menjadi bagian penting dalam mendukung stabilisasi fungsi operasional perusahaan, termasuk dalam memastikan transisi implementasi SAK-EP dapat berjalan lebih terarah. Selanjutnya, penguatan struktur tata kelola perusahaan semakin lengkap dengan ditetapkannya Direktur Utama serta dua orang Komisaris yang resmi menjabat pada Triwulan I tahun 2026. Dengan terpenuhinya kembali struktur organ perusahaan secara lengkap, diharapkan proses pengambilan keputusan strategis dapat berjalan lebih efektif, sehingga kinerja operasional bank dapat kembali meningkat, implementasi SAK-EP dapat berjalan lebih optimal, serta arah pengembangan usaha menjadi lebih terarah dan berkelanjutan.

3. Kebijakan Internal

Kekosongan pada posisi direksi dan komisaris turut memengaruhi pelaksanaan kebijakan Keuangan Berkelanjutan tahun 2025. Sebagian kebijakan internal difokuskan pada penyesuaian instrumen proses bisnis dan operasional, serta penanganan isu-isu internal sepanjang tahun 2025.

4. Keahlian SDM Bank

Dari sisi keahlian Sumber Daya Manusia (SDM), PT BPR NTB PERSERODA dalam pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan masih memerlukan perhatian dan penguatan lebih lanjut. Keterbatasan pelatihan yang secara khusus membahas Keuangan Berkelanjutan berdampak pada terbatasnya referensi teknis yang dapat digunakan oleh pegawai dalam proses penyusunan kebijakan maupun implementasi program Keuangan Berkelanjutan di lingkungan perusahaan. Kondisi tersebut menyebabkan pemahaman yang bersifat komprehensif terkait aspek keberlanjutan, seperti integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam proses bisnis, belum sepenuhnya merata di seluruh unit kerja. Akibatnya, pengembangan kebijakan Keuangan Berkelanjutan masih lebih banyak mengacu pada penyesuaian regulasi dan praktik umum industri, dibandingkan hasil kajian internal yang lebih mendalam. Namun demikian, dari sisi peningkatan kompetensi teknis, khususnya dalam penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report), BPR telah menunjukkan upaya yang positif. Hal ini diwujudkan melalui keikutsertaan pegawai dalam berbagai sosialisasi, bimbingan teknis, serta pelatihan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun pihak terkait lainnya. Partisipasi tersebut memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman teknis pelaporan, standar penyajian data, serta pemenuhan aspek kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Ke depan, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan di bidang Keuangan Berkelanjutan menjadi kebutuhan penting agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan.

5. Lainnya

Tantangan dan permasalahan dari sisi internal yang dihadapi PT BPR NTB PERSERODA pada tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris. Kondisi ini memberikan dampak langsung terhadap efektivitas tata kelola perusahaan (good corporate governance), khususnya dalam fungsi pengambilan keputusan strategis, pengawasan, serta arah kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang. Ketiadaan organ Direksi dan Komisaris secara lengkap menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih terbatas dan cenderung bersifat operasional-reaktif. Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam implementasi beberapa kebijakan strategis, termasuk pengembangan bisnis, penguatan manajemen risiko, serta percepatan transformasi layanan. Dalam kondisi tersebut, ruang gerak manajemen dalam merespons dinamika bisnis dan regulasi menjadi tidak sepenuhnya optimal. Dari sisi operasional, kekosongan jabatan tersebut juga menimbulkan tantangan dalam menjaga konsistensi arah kebijakan internal. Beberapa program kerja yang telah direncanakan tidak dapat dijalankan secara penuh, sehingga diperlukan penyesuaian dan prioritas ulang terhadap kegiatan yang bersifat esensial untuk menjaga keberlangsungan operasional bank. Selain itu, fungsi pengawasan internal strategis yang seharusnya dijalankan oleh Komisaris juga menjadi terbatas, sehingga penguatan kontrol internal lebih banyak bertumpu pada mekanisme operasional yang ada. Kondisi ini meningkatkan kebutuhan akan koordinasi lintas unit kerja serta penguatan peran manajemen menengah dalam menjaga stabilitas kegiatan usaha. Secara keseluruhan, kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris menjadi tantangan utama internal pada tahun 2025 yang mempengaruhi efektivitas tata kelola, kecepatan pengambilan keputusan, serta optimalisasi kinerja perusahaan. Namun demikian, kondisi ini juga menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk melakukan konsolidasi internal dan penguatan sistem operasional sebagai fondasi perbaikan di masa mendatang.

Upaya yang dilakukan

Berbagai tantangan yang terjadi sepanjang tahun 2025, baik dari sisi tata kelola akibat kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris maupun dari sisi teknis berupa implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP), telah direspons oleh PT BPR NTB PERSERODA melalui sejumlah upaya penyesuaian dan penguatan internal guna menjaga keberlangsungan kegiatan usaha. Dari sisi tata kelola dan operasional, perusahaan melakukan penguatan kendali internal dengan menata ulang mekanisme kerja, memperjelas alur koordinasi antar unit, serta meningkatkan intensitas pengawasan operasional harian. Dalam kondisi keterbatasan organ pengambil keputusan strategis, peran manajemen operasional dan unit kerja teknis dioptimalkan untuk memastikan seluruh aktivitas bisnis tetap berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dilakukan pula prioritas ulang terhadap program kerja, dengan fokus pada kegiatan yang bersifat esensial untuk menjaga stabilitas layanan kepada nasabah. Dalam rangka menjaga kualitas layanan, bank juga melakukan berbagai penyesuaian operasional, termasuk penguatan sistem pelayanan, peningkatan respons terhadap kebutuhan nasabah, serta pengelolaan risiko operasional secara lebih ketat. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan potensi penurunan kualitas layanan di tengah dinamika organisasi yang terjadi. Dari sisi implementasi SAK-EP, bank telah melakukan berbagai upaya adaptasi melalui penyesuaian sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, khususnya terkait penerapan perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berbasis Expected Credit Loss (ECL) serta implementasi Effective Interest Rate (EIR). Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan peningkatan kapasitas sistem informasi akuntansi, penguatan kualitas data, serta penyesuaian proses bisnis agar selaras dengan kebutuhan standar baru. Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi fokus penting, melalui partisipasi pegawai dalam berbagai sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun pihak terkait lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman teknis dalam penyusunan laporan keuangan, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), serta laporan keberlanjutan. Seiring dengan proses pengisian jabatan Direksi dan Komisaris melalui mekanisme seleksi Pemegang Saham, bank juga mulai melakukan konsolidasi kembali arah kebijakan strategis. Kehadiran Direktur Operasional pada Triwulan IV tahun 2025 menjadi titik awal penguatan kembali fungsi manajerial, yang kemudian diperkuat dengan lengkapnya struktur Direksi dan Komisaris pada Triwulan I tahun 2026. Secara keseluruhan, berbagai upaya tersebut menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga stabilitas operasional, memperkuat tata kelola, serta memastikan implementasi SAK-EP dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan, sekaligus menjadi fondasi penting bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Tantangan dan Permasalahan yang dihadapi dari Sisi Eksternal

1. Kebijakan Pemerintah

Sepanjang tahun 2025, berbagai kebijakan Pemerintah Daerah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengembangan bisnis PT BPR NTB PERSERODA, khususnya dalam mendukung pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor pendorong utama dalam peningkatan inklusi keuangan di wilayah kerja bank. Melalui program subsidi bunga yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, akses pembiayaan bagi pelaku UMKM menjadi lebih terjangkau. Skema subsidi ini secara langsung meringankan beban bunga pinjaman, sehingga mendorong peningkatan permintaan kredit produktif di kedua wilayah tersebut. Dampak positifnya secara nyata dirasakan oleh pelaku UMKM, baik dalam peningkatan kapasitas usaha, perluasan kegiatan produksi, maupun penguatan arus kas usaha. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga menerbitkan kebijakan Program UPLAND yang ditujukan kepada petani bawang di wilayah Sumbawa. Program ini memberikan dukungan pembiayaan dan penguatan sektor pertanian berbasis komoditas unggulan daerah, sehingga membuka peluang lebih besar bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing hasil pertanian. PT BPR NTB PERSERODA berperan aktif dalam menyalurkan pembiayaan pada sektor tersebut, sehingga program dapat berjalan secara efektif di tingkat lapangan. Secara keseluruhan, berbagai kebijakan tersebut mendorong percepatan implementasi inklusi keuangan yang dapat digerakkan secara lebih masif sepanjang tahun 2025. Aktivitas penyaluran kredit mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada sektor produktif. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dan peran intermediasi bank daerah mampu memberikan dampak nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat, khususnya dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan sektor pertanian di wilayah Nusa Tenggara Barat.

2. Perekonomian Nasional, Regional, dan Global

Perkembangan perekonomian nasional, regional, dan global sepanjang tahun 2025 memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kinerja dan arah bisnis PT BPR NTB PERSERODA yang berdomisili di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dinamika ekonomi tersebut menjadi faktor eksternal yang turut membentuk kondisi permintaan kredit, kualitas portofolio pembiayaan, serta kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban. Pada tingkat nasional, perekonomian Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil, didorong oleh konsumsi domestik dan peningkatan aktivitas sektor UMKM. Namun demikian, kebijakan moneter yang cenderung ketat dalam rangka pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar berdampak pada tingkat suku bunga acuan yang relatif tinggi. Kondisi ini memengaruhi cost of fund perbankan serta meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran kredit, khususnya pada segmen mikro dan kecil. Di sisi lain, program pemerintah dalam penguatan UMKM dan inklusi keuangan tetap menjadi katalis positif bagi pertumbuhan penyaluran kredit BPR. Pada tingkat regional, perekonomian Nusa Tenggara Barat menunjukkan perkembangan yang didorong oleh sektor pariwisata, pertanian, dan perdagangan. Pemulihan sektor pariwisata pasca normalisasi aktivitas ekonomi memberikan dampak positif terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan usaha di sektor riil. Selain itu, program-program pemerintah daerah seperti subsidi bunga kredit UMKM, penguatan sektor pertanian, serta program inklusi keuangan turut mendorong peningkatan aktivitas intermediasi perbankan daerah. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya permintaan pembiayaan yang disalurkan oleh PT BPR NTB PERSERODA. Sementara itu, pada tingkat global, ketidakpastian ekonomi akibat fluktuasi harga komoditas, geopolitik, serta perubahan kebijakan suku bunga global masih memberikan tekanan tidak langsung terhadap perekonomian domestik. Dampaknya antara lain terlihat pada volatilitas nilai tukar, potensi kenaikan harga barang impor, serta peningkatan risiko inflasi. Kondisi ini turut memengaruhi kemampuan daya beli masyarakat dan profil risiko debitur, sehingga memerlukan penguatan manajemen risiko kredit secara lebih hati-hati. Secara keseluruhan, kombinasi dinamika perekonomian nasional, regional, dan global tersebut memberikan tantangan sekaligus peluang bagi PT BPR NTB PERSERODA. Di satu sisi terdapat tekanan pada biaya dana dan risiko kredit, namun di sisi lain terdapat peluang pertumbuhan dari sektor UMKM dan program pemerintah daerah yang mendukung inklusi keuangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang adaptif, penguatan manajemen risiko, serta optimalisasi peran intermediasi untuk menjaga keberlanjutan kinerja usaha di wilayah NTB.

3. Lainnya

Isu peralihan mekanisme pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Online yang langsung ditransfer ke rekening tabungan ASN di Bank Pembangunan Daerah (BPD) memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pola pengelolaan risiko kredit, khususnya pada segmen kredit konsumtif di PT BPR NTB PERSERODA. Sebelumnya, pembayaran kewajiban kredit ASN dilakukan secara kolektif melalui mekanisme pemotongan gaji oleh bendahara atau juru bayar pada masing-masing kantor dinas atau instansi. Sistem ini memberikan tingkat kepastian pembayaran yang relatif tinggi, karena angsuran kredit langsung dipotong dari sumber pendapatan utama debitur sebelum dana diterima secara penuh oleh yang bersangkutan. Dengan demikian, risiko keterlambatan pembayaran dapat diminimalkan melalui mekanisme kontrol institusional. Namun, dengan adanya peralihan ke sistem SIPD Online, gaji ASN kini diterima secara langsung ke rekening masing-masing pegawai tanpa mekanisme pemotongan otomatis di tingkat instansi. Perubahan ini berdampak pada menurunnya tingkat keterikatan pembayaran kredit, sehingga pengelolaan angsuran menjadi sepenuhnya bergantung pada kedisiplinan individu debitur. Kondisi tersebut meningkatkan risiko moral hazard dan berpotensi menyebabkan keterlambatan pembayaran angsuran. Dampak langsung dari perubahan sistem ini terlihat pada peningkatan nominal kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) pada segmen kredit konsumtif ASN. Beberapa kasus keterlambatan pembayaran mulai muncul karena perubahan pola cash flow debitur yang sebelumnya bersifat otomatis menjadi manual. Hal ini menuntut adanya penyesuaian strategi mitigasi risiko oleh bank, termasuk penguatan monitoring, intensifikasi penagihan, serta evaluasi ulang skema kredit konsumtif yang disalurkan kepada ASN. Sebagai respons atas kondisi tersebut, PT BPR NTB PERSERODA perlu melakukan penguatan kerja sama dengan instansi pemerintah daerah dan BPD dalam rangka mencari skema alternatif pengamanan pembayaran kredit, misalnya melalui mekanisme standing instruction atau sistem auto-debet yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, diharapkan risiko peningkatan kredit bermasalah dapat ditekan, sekaligus menjaga kualitas portofolio kredit tetap sehat dan berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan

Berbagai dinamika eksternal sepanjang tahun 2025, baik dari kebijakan pemerintah daerah, kondisi perekonomian nasional, maupun perubahan mekanisme pembayaran gaji ASN melalui SIPD Online, telah direspons oleh PT BPR NTB PERSERODA dengan sejumlah upaya adaptif untuk menjaga stabilitas kinerja dan kualitas portofolio kredit. Terhadap kebijakan pemerintah daerah yang mendorong penguatan UMKM, seperti program subsidi bunga di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Barat serta Program UPLAND di Kabupaten Sumbawa, bank melakukan optimalisasi penyaluran kredit produktif dengan lebih agresif namun tetap selektif. Bank juga memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka mendukung program inklusi keuangan, sehingga pembiayaan dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada pelaku usaha dan sektor pertanian. Dalam menghadapi kondisi perekonomian nasional dan global yang masih diwarnai ketidakpastian, termasuk kebijakan suku bunga yang tinggi dan volatilitas ekonomi global, bank melakukan penguatan manajemen risiko kredit melalui pengetatan analisis kelayakan debitur, pengawasan portofolio secara lebih intensif, serta peningkatan mitigasi risiko terhadap sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan ekonomi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas aset dan menekan potensi penurunan kualitas kredit. Sementara itu, terkait pengaruh perubahan sistem pembayaran gaji ASN melalui SIPD Online yang berdampak pada meningkatnya risiko kredit konsumtif, bank melakukan penyesuaian strategi mitigasi risiko dengan memperkuat monitoring pembayaran angsuran, meningkatkan komunikasi dengan debitur ASN, serta melakukan evaluasi ulang terhadap skema penyaluran kredit konsumtif. Selain itu, bank juga mendorong penguatan mekanisme pembayaran otomatis seperti auto-debet atau kerja sama teknis dengan instansi terkait guna mengurangi potensi keterlambatan pembayaran. Secara keseluruhan, berbagai upaya tersebut mencerminkan langkah adaptif bank dalam merespons perubahan kebijakan pemerintah, dinamika ekonomi, serta perubahan sistem pembayaran gaji ASN, dengan tujuan utama menjaga kualitas portofolio kredit, stabilitas operasional, dan keberlanjutan pertumbuhan bisnis di wilayah Nusa Tenggara Barat.

5.

Tata Kelola Keberlanjutan

Struktur Tata Kelola Keberlanjutan

Struktur tata kelola Keuangan Berkelanjutan di PT BPR NTB PERSERODA mencakup peran dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, pegawai, pejabat, serta unit kerja terkait dalam mendukung implementasi Keuangan Berkelanjutan secara menyeluruh. Direksi memiliki peran dalam menetapkan arah kebijakan, strategi, serta memastikan integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam kegiatan operasional dan bisnis bank. Dewan Komisaris berperan dalam fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk memberikan arahan dan evaluasi atas penerapan Keuangan Berkelanjutan. Pegawai, pejabat, dan unit kerja bertanggung jawab atas implementasi teknis di tingkat operasional, termasuk dalam pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan. Unit bisnis menjadi pelaksana utama yang didukung oleh unit teknologi informasi dalam rangka persiapan dan penguatan infrastruktur perbankan digital. Dalam pelaksanaannya, unit kerja terkait juga berkolaborasi untuk membangun dan menerapkan budaya Keuangan Berkelanjutan di seluruh aspek organisasi, serta memastikan prinsip keberlanjutan terintegrasi dalam proses bisnis sehari-hari. Selain itu, unit kerja juga berperan dalam meningkatkan kompetensi dan keterampilan sumber daya manusia agar mampu mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan secara efektif, baik dari aspek operasional, pelaporan, maupun pengelolaan risiko.

Struktur Organisasi dan Pengendalian Internal

Struktur Organisasi dan Pengendalian Internal

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
Jumlah Unit Kerja yang menangani Keuangan Berkelanjutan dan Pengendalian Risiko Iklim	1	1	-
Jumlah SPO Manajemen Risiko terkait Keuangan Berkelanjutan	-	-	-

Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan

Program Pengembangan Bagi Internal Bank Pada Setiap Level Jabatan

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Dewan Komisaris	-	-	-
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Direksi	-	1	1
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Pejabat Eksekutif	1	1	1
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Pegawai	1	1	1

Pada tahun 2026, Divisi IT dan Divisi Perencanaan turut serta dalam kegiatan pelatihan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) serta Laporan Keberlanjutan sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas internal perusahaan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis dan kompetensi sumber daya manusia dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan ke dalam perencanaan dan pelaporan perusahaan. Partisipasi dalam pelatihan tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa proses penyusunan RAKB dan Laporan Keberlanjutan dapat dilakukan secara lebih sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, keterlibatan Divisi IT juga memperkuat aspek dukungan sistem informasi dan pengelolaan data, yang menjadi komponen penting dalam penyusunan laporan yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Divisi Perencanaan berperan dalam memperkuat integrasi antara strategi bisnis perusahaan dengan agenda Keuangan Berkelanjutan, sehingga penyusunan RAKB tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga selaras dengan arah pengembangan usaha jangka menengah dan panjang. Sinergi antar divisi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas implementasi Keuangan Berkelanjutan secara menyeluruh di lingkungan PT BPR NTB PERSERODA. Secara keseluruhan, kegiatan pelatihan ini menjadi bagian penting dari upaya perusahaan dalam memperkuat fondasi tata kelola, meningkatkan kapasitas internal, serta memastikan penerapan Keuangan Berkelanjutan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan terdokumentasi dengan baik pada periode berikutnya.

Identifikasi Risiko Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Perusahaan telah memiliki kebijakan Anti Fraud yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta telah diimplementasikan ke dalam bentuk prosedur operasional sebagai pedoman dalam pengelolaan risiko. Kebijakan ini menjadi dasar dalam upaya perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan potensi risiko fraud yang dapat terjadi dalam aktivitas operasional maupun bisnis. Penerapan kebijakan Anti Fraud tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan. Melalui kebijakan ini, perusahaan berupaya memastikan bahwa setiap proses bisnis berjalan sesuai prinsip kehati-hatian, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, kebijakan Anti Fraud juga berperan penting dalam mendukung implementasi Keuangan Berkelanjutan, khususnya dalam aspek penguatan tata kelola (good governance) dan manajemen risiko. Dengan adanya sistem pengendalian yang lebih terstruktur, perusahaan dapat meminimalkan potensi penyimpangan yang dapat berdampak pada kinerja keuangan maupun reputasi lembaga. Secara keseluruhan, kebijakan ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga integritas operasional perusahaan, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung terciptanya pertumbuhan usaha yang sehat, berkelanjutan, dan berlandaskan prinsip tata kelola yang baik.

Keterlibatan dan Penjelasan Terkait Pemangku Kepentingan

Pemegang Saham

Pemegang Saham berperan sebagai pengarah utama kebijakan perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam konteks Keuangan Berkelanjutan, Pemegang Saham menetapkan arah strategis, termasuk penguatan implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), penguatan tata kelola, serta persetujuan kebijakan yang mendukung pembiayaan produktif dan inklusi keuangan. Pemegang Saham juga memastikan bahwa agenda keberlanjutan menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan.

Pemerintah

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, berperan sebagai regulator sekaligus enabler kebijakan. Pemerintah Daerah NTB mendukung implementasi Keuangan Berkelanjutan melalui program subsidi bunga, penguatan UMKM, serta program sektor pertanian seperti UPLAND. Kebijakan ini menjadi katalis bagi penyaluran pembiayaan yang lebih inklusif dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Otoritas

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai regulator utama yang menetapkan pedoman dan ketentuan Keuangan Berkelanjutan, termasuk kewajiban penyusunan RAKB dan Laporan Keberlanjutan. OJK juga melakukan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut, sehingga memastikan bahwa BPR menjalankan prinsip keberlanjutan secara konsisten, transparan, dan sesuai regulasi.

Akademisi

Akademisi berperan dalam memberikan kajian ilmiah, riset, serta pengembangan konsep Keuangan Berkelanjutan. Keterlibatan akademisi membantu perusahaan dalam memahami tren, metodologi, serta best practice implementasi ESG (Environmental, Social, Governance). Selain itu, akademisi juga menjadi mitra dalam kegiatan seminar, pelatihan, dan penguatan kapasitas SDM.

Praktisi

Praktisi, seperti konsultan, asosiasi perbankan, dan pelaku industri keuangan, berperan dalam memberikan pendampingan teknis dan implementatif. Mereka membantu BPR dalam penerapan kebijakan operasional, pengembangan sistem pelaporan, serta peningkatan kualitas manajemen risiko yang selaras dengan prinsip Keuangan Berkelanjutan.

Pegawai

Pegawai merupakan pelaksana utama implementasi Keuangan Berkelanjutan di tingkat operasional. Peran pegawai mencakup penyusunan RAKB, pelaporan keberlanjutan, implementasi kebijakan pembiayaan, serta pengelolaan risiko. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sosialisasi menjadi kunci agar seluruh pegawai memiliki pemahaman yang selaras terhadap prinsip keberlanjutan.

Nasabah

Nasabah, khususnya pelaku UMKM, petani, dan ASN, merupakan penerima manfaat utama dari implementasi Keuangan Berkelanjutan. Melalui akses pembiayaan yang inklusif, seperti program subsidi bunga dan kredit produktif, nasabah dapat meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraan ekonomi. Perilaku pembayaran dan kepatuhan nasabah juga berkontribusi langsung terhadap kualitas portofolio kredit bank.

Lainnya

Pemangku kepentingan lainnya mencakup asosiasi perbankan (seperti PERBARINDO), lembaga keuangan mitra, serta komunitas lokal. Peran mereka adalah memperkuat ekosistem Keuangan Berkelanjutan melalui kolaborasi, pertukaran informasi, serta dukungan terhadap pengembangan kebijakan dan inovasi layanan keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Umpan Balik

Bagian ini disediakan sebagai sarana bagi pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, saran, maupun tanggapan terhadap Laporan Keberlanjutan yang disusun oleh PT BPR NTB PERSERODA. Penyediaan lembar umpan balik ini mencerminkan komitmen bank terhadap prinsip keterbukaan, transparansi, serta peningkatan kualitas pelaporan secara berkelanjutan. Melalui lembar umpan balik ini, pembaca diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan perspektif dan penilaian terhadap isi laporan, baik dari sisi kelengkapan informasi, kejelasan penyajian, maupun relevansi terhadap kebutuhan pemangku kepentingan. Setiap masukan yang diterima akan menjadi bahan evaluasi penting bagi perusahaan dalam menyempurnakan kualitas Laporan Keberlanjutan pada periode berikutnya. Tanggapan yang disampaikan melalui lembar umpan balik ini juga merupakan bagian dari mekanisme keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder engagement), yang berperan penting dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola dan transparansi informasi. Dengan demikian, proses pelaporan tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga menjadi ruang dialog antara perusahaan dan para pemangku kepentingan. PT BPR NTB PERSERODA berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap masukan yang diterima secara proporsional sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja dan komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan.

Berikut ini adalah link formulir umpan balik untuk pembaca :

<https://forms.gle/HKjusJpfLPBUXtzq5>



Pada periode pelaporan sebelumnya, PT BPR NTB PERSERODA belum menerima umpan balik secara formal dari pemangku kepentingan terkait Laporan Keberlanjutan yang telah disampaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi dan penyampaian tanggapan terhadap laporan masih dalam tahap awal pengembangan dan perlu ditingkatkan pada periode berikutnya. Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip keterbukaan dan peningkatan kualitas pelaporan, bank telah dan akan terus melakukan upaya untuk mendorong partisipasi pemangku kepentingan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan sarana umpan balik yang lebih mudah diakses, baik dalam bentuk formulir fisik maupun digital, serta penguatan sosialisasi mengenai keberadaan dan tujuan Laporan Keberlanjutan kepada nasabah, pegawai, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, bank juga berupaya meningkatkan komunikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan melalui berbagai kegiatan, seperti forum diskusi, sosialisasi program keuangan berkelanjutan, serta pemanfaatan kanal komunikasi resmi perusahaan. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam memberikan masukan terhadap isi laporan. Ke depan, PT BPR NTB PERSERODA berkomitmen untuk memperkuat mekanisme umpan balik sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan, sehingga Laporan Keberlanjutan tidak hanya menjadi sarana pelaporan, tetapi juga menjadi media dialog yang konstruktif antara bank dan seluruh pemangku kepentingan.

PENUTUP

Demikian Laporan Berkelanjutan PT BPR NTB PERSERODA tahun buku 2025 ini kami sampaikan. Kami harapkan arahan guna penyempurnaan Laporan Tahunan pada tahun berikutnya.

Mataram, 29 April 2026
PT. BPR NTB PERSERODA

Mengetahui -
Dewan Komisaris,



Lalu Kholid Karyadi, ST
Komisaris Utama

Disusun oleh
Direksi,



Faisal, SE., MM.
Direktur Utama